

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung

dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, maka Bupati/Walikota berkewajiban menyusun LAKIP Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, serta menyampaikannya kepada Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 kepada seluruh *stakeholders*.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2010;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2010, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang;

- c. Karena tahun 2010 sebagai akhir masa jabatan kepala daerah maka LAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 ini merupakan evaluasi kinerja selama 5 tahun yaitu tahun 2006 sampai tahun 2010.
- d. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011.
- q. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011

D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

D.1. Geografis, Topografi dan Hidrografi

Kabupaten Pacitan secara administratif terbagi atas 12 kecamatan, yaitu : Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Pringkuku, Punung, Donorojo, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro dan terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kemudian ada 1.613 Rukun Warga (RW) dan 5.166 Rukun Tetangga (RT).

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian sebelah Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan terletak diantara 110° 55'-111° 25' Bujur Timur dan 07° 55'-08° 17' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Selatan Pulau Jawa.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Wonogiri
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Trenggalek
- c. Sebelah Selatan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut : a) Datar seluas 4%; b) Berombak seluas 10%; c) Bergelombang seluas 24%; d) Berbukit dengan sebaran 52%; e) Bergunung seluas 10%.

Secara hidrografi Kabupaten Pacitan beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2010 terjadi pada bulan Pebruari yaitu sekitar 482,58 mm³, dan banyaknya hari hujan yang terjadi pada tahun 2010 terjadi pada bulan Januari Air hujan ini mengalir melalui 3 sungai besar yang terdapat di Kabupaten Pacitan yaitu Sungai Grindulu, Sungai Lorok dan Sungai Kedungpring.

D.2. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai obyek pembangunan. Pada Tahun 2009 penduduk Kabupaten Pacitan berjumlah 558.644 jiwa, terdiri dari 269,717 laki-laki (48,28%), dan 288.927 perempuan (51,71%), dengan pertumbuhan penduduk 0,29%. Kepadatan penduduk pada tahun 2010 mencapai 402 jiwa/km², dengan kepadatan

penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pacitan yang mencapai 849 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pringkuku dengan angka kepadatan 244 jiwa/km². Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010 adalah 559.950 jiwa, karena sampai awal 2011 BPS belum menerbitkan data indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2010.

Tabel I.1.

Komposisi Penduduk Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2009

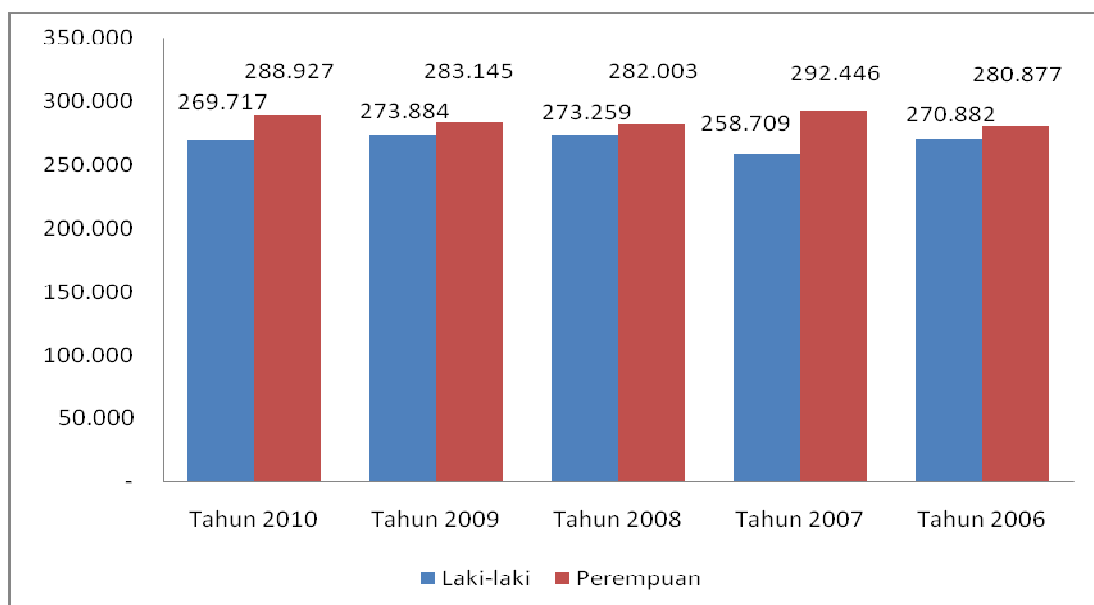
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Donorojo	18.882	21.943	40.825
2	Punung	17.845	18.217	36.062
3	Pringkuku	14.717	17.013	32.630
4	Pacitan	31.905	33.741	65.646
5	Kebonagung	21.453	24.026	45.479
6	Arjosari	19.247	20.740	39.987
7	Nawangan	23.926	26.660	50.586
8	Bandar	20.730	23.378	44.108
9	Tegalombo	24.885	25.846	50.731
10	Tulakan	40.664	37.643	78.307
11	Ngadirojo	20.872	23.378	44.250
12	Sudimoro	14.591	15.442	30.033
Jumlah	Tahun 2009	269.717	288.927	558.644
	Tahun 2008	273.884	283.145	557.029
	Tahun 2007	273.259	282.003	555.262
	Tahun 2006	258.709	292.446	551.155

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Bila dilihat rasio jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kabupaten Pacitan selama periode 2006-2010 menunjukkan kisaran angka 96, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pacitan selama tahun 2006-2010 berkisar pada angka 0,76% per tahun. Perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik I.1.

**Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2009**



Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2009 sebanyak 354.510 jiwa berada pada usia produktif yaitu usia 15-64 tahun atau 63,46%. Sisanya berada pada usia tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) yaitu sebesar 204.134 jiwa atau 36,54%. Dengan komposisi tersebut, maka sumber daya manusia Kabupaten Pacitan cukup potensial dalam pembangunan daerah.

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2009

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	0-4	42.469	27.268	35.024	34.101	35.394
2	5-9	46.626	37.370	42.544	40.127	44.128
3	10-14	48.141	51.940	44.208	45.054	48.830
4	15-19	44.947	43.647	38.058	39.871	34.373
5	20-24	34.251	34.537	30.635	26.373	25.750
6	25-29	42.165	36.047	35.202	30.831	35.049
7	30-34	43.968	38.544	31.531	32.495	35.950
8	35-39	44.000	48.943	46.506	45.979	46.969
9	40-44	38.913	44.097	43.496	45.896	43.013
10	45-49	34.101	46.327	44.405	39.553	42.950
11	50-54	28.209	33.195	33.922	38.928	33.462
12	55-59	25.476	28.053	30.540	36.098	31.603
13	60-64	25.422	19.698	24.490	23.967	25.391
14	65+	53.071	61.489	74.701	77.756	75.782
Jumlah		551.759	551.155	555.262	557.029	558.644

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

D.3. Sosial Budaya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang

atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, yang menurut UNDP dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

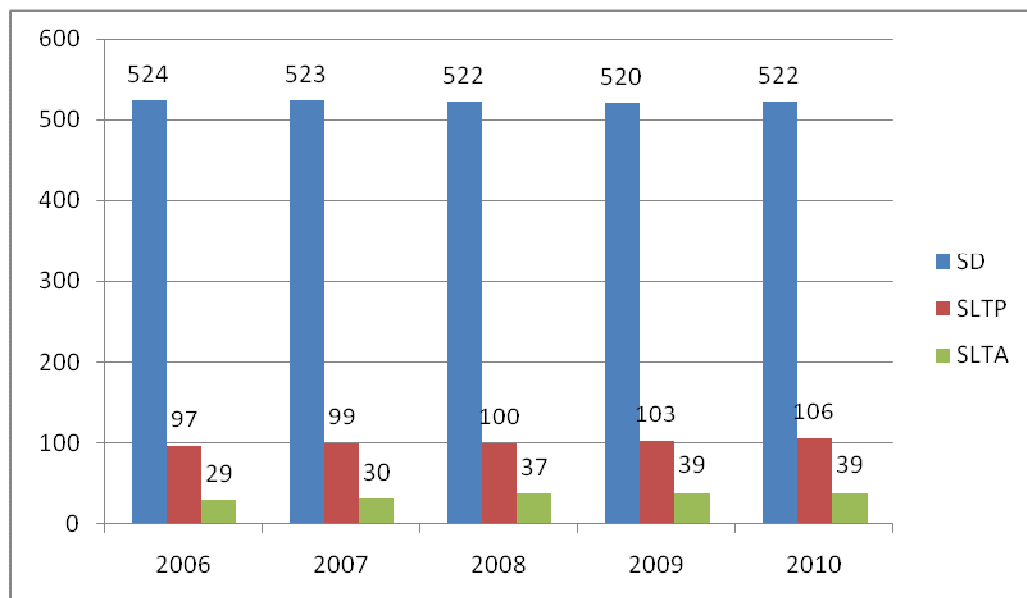
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan pada tahun 2009 adalah sebesar 71,23, sedangkan IPM Propinsi Jawa Timur sebesar 70,06 dan IPM nasional sebesar 71,76. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Pacitan lebih tinggi daripada IPM Propinsi Jawa Timur. Sedangkan proyeksi data IPM tahun 2010 sebesar 71,50.

a. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus peningkatan pembangunan SDM saat ini adalah pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk untuk mengecap pendidikan terutama penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Bila dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk Kabupaten Pacitan yang berusia 10 tahun ke atas adalah lulusan SD/ sederajat sebesar 32,31%, disusul dengan lulusan SLTP/ sederajat sebesar 15,73%, lulusan SLTA/ sederajat sebesar 7,76%, lulusan D1/D2/D3/ akademi sebesar 0,75% dan lulusan universitas sebesar 2,16%. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Pacitan hingga tahun 2010 meliputi sekolah setingkat SD/ sederajat 522 buah, SLTP/ Sederajat 106 buah, SLTA/ sederajat 39 buah. Jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Pacitan pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Grafik I.2.
Perkembangan Jumlah Sekolah SD, SLTP, SLTA
Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010



Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Tabel I.3.
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2009

NO	Uraian	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekolah					
	SD/Sederajat	524	523	522	520	522
	SLTP/Sederajat	97	99	100	103	106
	SLTA/Sederajat	29	30	37	39	39
2	Guru					
	SD/Sederajat	4.313	4.589	5.000	5.578	5.647
	SLTP/Sederajat	2.372	2.320	2.368	2.352	2.497
	SLTA/Sederajat	1.003	1.557	1.237	1.194	1.432
3	Murid					
	SD/Sederajat	56.942	56.072	55.210	54.653	52.920
	SLTP/Sederajat	24.865	30.494	25.105	26.484	25.652
	SLTA/Sederajat	11.099	11.118	12.294	13.564	14.016

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

b. Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pemerintahan karena mendukung kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Saat ini banyak program kesehatan yang lebih diprioritaskan pada calon generasi penerus yaitu calon bayi dan balita.

Upaya-upaya di bidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik beserta tenaga medis yang profesional akan dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan penduduk.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran adalah indeks harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Pacitan telah mengalami peningkatan dari 70,40 tahun pada tahun 2006 menjadi 70,90 tahun pada tahun 2010. Angka ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat/derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan orang yang derajat kesehatannya buruk.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan kapasitas 104 tempat tidur, 24 unit puskesmas, 55 unit puskesmas pembantu, 37 unit puskesmas keliling dan 792 unit posyandu. Jumlah puskesmas keliling dan posyandu dalam periode tahun 2006-2010 mengalami peningkatan. Dari 28 unit puskesmas keliling pada tahun 2006 meningkat menjadi 37 unit pada tahun 2010. Demikian pula dengan posyandu dari 762 unit pada tahun 2006 meningkat menjadi 792 unit pada tahun 2010. Jumlah tenaga kesehatan non RSUD Pacitan selama kurun waktu 2006-2009 mengalami peningkatan yang sangat pesat seperti terlihat pada tabel I.4. berikut.

Tabel I.4.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010

No	Jenis Tenaga	Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter/Dokter Gigi	40	40	40	49	48
2	Perawat	145	128	146	160	196
3	Bidan	144	165	208	217	229
4	Non Paramedis & lain-lain	306	336	389	408	471
Jumlah		635	669	783	834	944

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Sedangkan jumlah tenaga di RSUD Pacitan dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sampai dengan tahun 2010 sejumlah 443 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.5.
Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Pacitan Tahun 2010

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA			
		PNS	CPNS	THL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dokter Umum	12	16	0	28
2	Dokter Spesialis	4	3	2	9
3	Dokter Gigi	5	0	0	5
4	Perawat	67	35	34	136
5	Bidan	9	16	5	30
6	Non Perawatan	126	71	38	235
Jumlah		223	141	79	443

Sumber: RSUD Pacitan Tahun 2010

RSUD Pacitan sesuai dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kewenangan untuk merekrut tenaga BLUD dalam bentuk Tenaga Harian Lepas (THL), dan pada tahun 2010 telah merekrut THL sejumlah 79 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga di RSUD Pacitan.

c. Agama

Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa, karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Pembinaan kehidupan keagamaan perlu terus ditingkatkan melalui dakwah dan bimbingan agama agar masyarakat memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus dapat mengamalkannya dengan benar. Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.6.

Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2009

No	Sarana Ibadah	Jumlah Tempat Peribadatan				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Masjid	1.297	1.332	1.391	1.300	1.429
2	Langgar	1.054	949	947	949	1.049
3	Musholla	360	547	563	547	805
4	Gereja	7	8	8	8	8
5	Pura	-	-	-	-	-
6	Vihara	-	-	-	-	-
Jumlah		2.718	2.836	2.909	2.804	3.291

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

d. Pariwisata

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang memiliki cukup banyak obyek wisata sehingga pariwisata menjadi salah satu andalan, karena terdapat sekitar 41 obyek wisata yang tersebar di wilayah ini. Obyek andalan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah pantai dan gua. Sampai tahun 2010 ada 19 obyek wisata yaitu Pantai Teleng Ria, Pantai Tamperan, Pantai Srau, Pantai Watu Karung, Pantai Klayar, Pantai Segoro Anakan, Pantai Taman, Pemandian Air Hangat, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Kalak, Goa Putri, Pantai Dhaki, Pantai Buyutan, Pantai Pancer Door dan Monumen Tumpak Rinjing dan Monumen Perjuangan Jendral Sudirman. Serta ada 2 obyek khusus untuk ekspedisi yaitu Luweng Jaran dan Luweng Ombo. Salah satu penunjang sektor pariwisata ini adalah hotel. Terdapat sekitar 17 hotel dengan 277 kamar dan 469 tempat tidur.

Tabel I.7.

**Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Retribusi Pariwisata
Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010**

No	TAHUN	Kunjungan Wisatawan (Orang)	Retribusi Pariwisata (Rupiah)
1	2	3	4
1	2006	253.717	490.002.500
2	2007	302.042	752.642.000
3	2008	402.937	813.487.500
4	2009	475.612	1.005.236.000
5	2010	487.855	1.393.149.000

Sumber Data : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

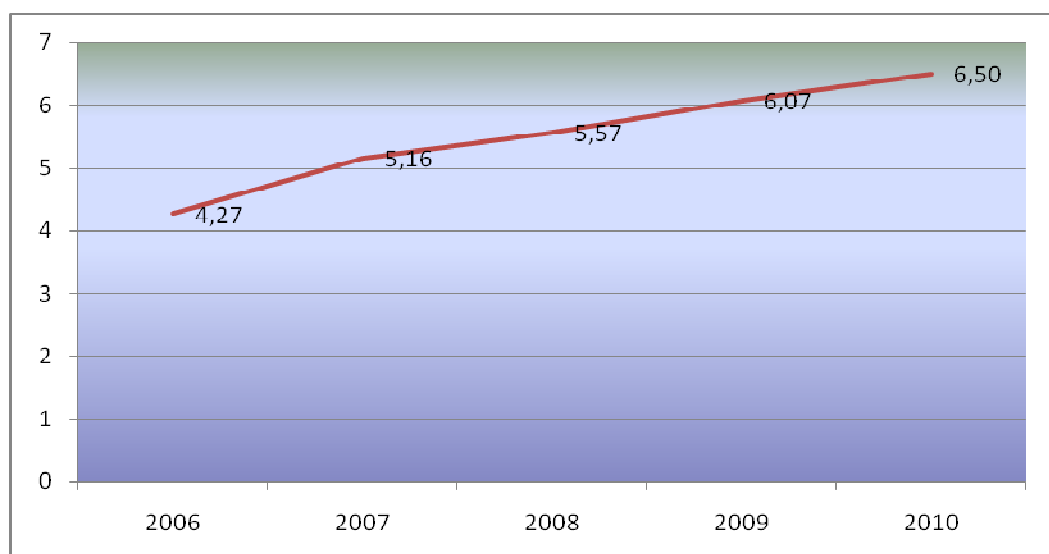
D.4. Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode dan di suatu daerah tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan selama lima tahun terakhir (2006-2010) nampak semakin membaik. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai yakni dari 4,27% pada tahun 2006 naik menjadi 6,07% pada tahun 2009 dan proyeksi untuk tahun 2010 sebesar 6,50%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 6,50% dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,70%. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik I.3.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010



Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan terutama didorong oleh sektor-sektor ekonomi yang memiliki andil cukup besar bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel I.8. berikut ini.

Tabel I.8.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2009

No	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	2,32	2,59	3,16	2,61	4,97
	a. Tanaman Bahan Makanan	0,63	0,69	0,81	1,31	5,29
	b. Tanaman Perkebunan Rakyat	7,05	7,67	8,62	3,81	2,29
	c. Peternakan	3,43	3,58	4,71	3,60	4,39
	d. Kehutanan	4,08	4,44	5,32	4,74	3,70
	e. Perikanan	8,84	9,79	12,06	13,96	13,52
2	Pertambangan dan penggalian	4,05	4,21	5,84	4,22	6,17
3	Industri pengolahan	5,81	7,25	8,40	6,36	2,43
4	Listrik, gas dan air bersih	20,30	18,07	11,31	9,01	8,81
5	Bangunan	6,13	6,33	7,79	9,78	9,50
6	Perdagangan, hotel dan restoran	3,64	5,25	7,95	9,21	8,85
7	Angkutan dan komunikasi	1,44	2,15	3,18	7,8	6,38
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	3,14	3,79	5,51	5,15	4,99
9	Jasa-jasa	5,73	6,57	6,33	7,82	6,41
Angka Pertumbuhan Ekonomi		3,66	4,27	5,16	5,57	6,24

Sumber: Pacitan Dalam Angka Tahun 2010

Meningkatnya PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi menunjukkan semakin membaiknya perekonomian di Kabupaten Pacitan. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,50%. Pada tahun 2009 sebesar 6,07% dan apabila dilihat dari masing-masing sektor terhadap PDRB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang masing-masing sebesar 37,29% dan 38,93%. Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang masing-masing sebesar 1,24% dan 1,07%. Sektor ekonomi yang mempunyai laju pertumbuhan diatas 5% pada tahun 2010 adalah tanaman bahan makanan sebesar 5,29%, perikanan sebesar 13,52%, pertambangan dan penggalian sebesar 6,17%, listrik, gas dan air bersih sebesar 8,81%, bangunan sebesar 9,5%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,56%, angkutan dan komunikasi sebesar 6,38% dan jasa-jasa sebesar 6,41%. Lapangan usaha pertanian tanaman pangan menjadi mata pencaharian utama penduduk Pacitan, lebih dari separuh penduduk umur 15 tahun keatas (203.998 jiwa) berusaha di sektor pertanian.

Pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2006 sebesar Rp.3.660.703,51, sedangkan tahun 2009 sebesar Rp.5.250.974,96, dan proyeksi tahun 2010 sebesar Rp.5.614.076,26. Bila dibandingkan dengan pendapatan per-kapita Propinsi Jawa Timur tahun 2010 adalah Rp.20.770.000,00 dan pendapatan per-kapita nasional pada tahun 2010 adalah Rp.28.145.631,00. PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2009 sebesar 2,933 trilyun rupiah, dan proyeksi tahun 2010 sebesar 3,143 trilyun rupiah, sedangkan PDRB Propinsi Jawa Timur sebesar 778,45 trilyun rupiah.

E. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

E.1. Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten terdiri dari :
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

E.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Kerjasama dan Perbatasan;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

E.1.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian;
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- d. Bagian Pengolah Data Elektronik.

E.1.3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.

E.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

E.3. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari 14 Dinas Daerah yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 4) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- 6) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 9) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E.4. Lembaga Teknis Daerah

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, ada 14 lembaga teknis daerah yaitu :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Inspektorat;
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 9) Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- 10) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 11) Kantor Lingkungan Hidup;
- 12) Kantor Ketahanan Pangan;
- 13) Kantor Pelayanan Perizinan;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada bulan Desember 2010 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

Sampai dengan Desember 2010 ada 15 lembaga teknis daerah, 14 dinas daerah dan 2 sekretariat sehingga total ada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pacitan.

E.5. Kecamatan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam wilayah kecamatan. Di Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan, yaitu :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) Pacitan, | 7) Punung, |
| 2) Arjosari, | 8) Donorojo, |
| 3) Tegalombo, | 9) Kebonagung, |
| 4) Nawangan, | 10) Tulakan, |
| 5) Bandar, | 11) Ngadirojo, |
| 6) Pringkuku, | 12) Sudimoro. |

E.6. Kelurahan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Pacitan terdapat 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1) Pacitan,
- 2) Pucangsewu,
- 3) Sidoharjo,
- 4) Ploso,
- 5) Baleharjo.

F. Sistematika LAKIP Tahun 2010

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu tahun 2006-2010. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan kinerja (*performance*) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sistematika penulisan yang dipakai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika LAKIP Tahun 2010

**BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006-2011**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- E. Rencana Kinerja Tahun 2010

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2010
- B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2010
- C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2006-2010
- E. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN